

ANALISIS SITUASIONAL PERSETERUAN KPK DAN POLRI PADA HARIAN KOMPAS (PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS)

Ismail Marzuki

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Email: ismailunimuda@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mendeskripsikan analisis situasional perseteruan KPK dan Pori pada *Harian Kompas*. Keberadaan bahasa di media massa dinilai tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menggambarkan sebuah realitas, tetapi juga dapat menentukan gambaran mengenai sebuah persepsi yang akan muncul di benak khalayak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan ancangan analisis wacana kritis. Data penelitian ini berupa teks berita perseteruan KPK dan Polri yang termuat pada *Harian Kompas*. Hasil analisis data penelitian menemukan bahwa, situasi perseteruan antara KPK dan Polri menampilkan situasi yang beragam berdasarkan metode penyajian berita dan memanfaatkan bahasa sebagai instrumen untuk menggambarkan situasi-situasi perseteruan antara KPK dan Polri. Berdasarkan analisa secara kritis ditemukan KPK dan Polri dalam berita yaitu; (a) saling melaporkan, (b) saling konfrontasi, (c) saling menyalahkan, (d) saling mencurigai, (e) saling menentang, dan (f) saling meyakinkan khalayak.

Kata Kunci: *AWK, Perseteruan KPK dan Polri, Situasional, Harian Kompas*

Abstract: *This study describes a situational analysis of the disagreement between the KPK and Polri in Kompas Daily. The existence of language in the massa media is considered not only used as a tool to describe a reality, but also to determine a picture of a perception that will appear in the minds of the audience. The research method used is descriptive qualitative. This study uses a critical discourse analysis approach. The data of this research is in the form of the contentious news text of the KPK and Polri which is published in Kompas Daily. The results of the research data analysis found that, the situation of the feud between the KPK and Polri presented a variation of situations based on the method of presenting news and using language as an instrument to describe the contradictory situations between the KPK and the Polri. Based on the critical analysis, the KPK and Polri found in the news, namely; (a) reporting each other, (b) confronting each other, (c) blaming each other, (d) suspecting each other, (e) opposing each other, and (f) mutually convincing audiences.*

Key Word: *AWK, Disagreement KPK and Polri, Situational, Kompas Daily*

PENDAHULUAN

Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beberapa kali terjadi dan menunjukkan situasi yang beragam dalam pemberitaannya. Tidak hanya itu, kasus ini memberi dampak yang cukup luas dalam perpolitikan dan pemberitaan di Indonesia. Masing-masing pihak dan pendukungnya memegang dasar argumentasi yang mengacu pada kewenangan institusi yang dijamin oleh hukum, sehingga polemik kelembagaan sulit terselesaikan. Hal ini dipandang perlu dilihat dari gambaran situasionalnya.

Melihat kenyataan yang terjadi menggambarkan berbagai pertentangan, dimana pihak KPK dan Polri saling melakukan konfrontasi. Sehingga berbagai situasi diungkapkan untuk menggambarkan situasi yang terjadi antara KPK dan Polri. Banyak pihak yang terlibat dalam perseteruan ini, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan atau kelompok.

Media masa di Indonesia dalam memberitakan perseteruan antara KPK dan Polri memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam pemberitaannya. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan partisipan yang ditampilkan. Selain itu, penggunaan bahasa yang beragam antara media yang satu dengan media yang lain tentu akan memberikan makna yang berbeda pula. Semua ini dilakukan tidak lepas dari situasi-situasi yang dilihat serta dipahami oleh pihak media.

Banyak media massa menjadikan perseteruan KPK dan Polri ini dalam wujud sebuah berita. Salah satunya adalah *Harian Kompas*. Dalam pemberitaannya tidak hanya menuliskan peristiwa secara objektif, tetapi mengkonstruksi berita dalam bentuk berita politik dan hukum. Berita politik (*political news*) adalah berita yang dipenuhi dengan berita-berita yang berkaitan dengan segala seluk-beluk sosial politik (Rahardi, 2012:24). Setiap politik ada suatu kepentingan yang diperjuangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya relasi kepentingan antara media dan pihak yang diberitakan.

Harian Kompas adalah surat kabar umum yang tersebar di Indonesia. Menurut Bland (2001:44) surat kabar umum merupakan semua surat kabar yang tidak dikhususkan untuk khalayak tertentu. Surat kabar ini menentukan khalayak berdasarkan peredarannya, yang bisa sangat luas. Surat kabar jenis ini, lebih merinci khalayaknya menurut kelas sosial, kecerdasan, aliran politik, dan kekayaan. Dalam pemberitaannya tidak menutup kemungkinan ada pihak yang dibela dan diperjuangkan.

Bagaimanapun juga, tidak ada proses produksi dan interpretasi yang lengkap dengan mengabaikan proses ketergantungan pada latar belakang sosial, yang terbentuk oleh aspek diluar linguistik yang juga bagian dari masyarakat (Fairclough, 2003:27). Maka dari itu, memahami berita melalui kajian kritis menarik untuk dilakukan, untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi.

Penelitian mengenai studi analisis wacana kritis media sudah banyak dilakukan, pernah dilakukan oleh Zakaria Siregar (2012) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Berita Kampanye Pasangan Ruhudman Harahap-Zulmi Eldin dan Sofyan Tan-Nelly Armayanti pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Medan 2010 di *Harian Analisa* dan *Harian Sumut Pos*”. Penelitian ini berfokus pada analisis isi berita, yang melihat konstruksi realitas wacana berita menggunakan pendekatan analisis wacana Norman Fairclough. Termasuk bagaimana kedua media memposisikan diri dalam pemberitaan tentang kampanye. Hasil analisis penelitian tersebut, menemukan masih terdapat teks-teks berita yang cenderung menghegemoni khalayak pembaca. Janji-janji kampanye yang dikonstruksi media melalui teks tidak lebih dari cek kosong dan publik tidak mendapatkan ruang dalam wacana yang dihadirkan media.

Selanjutnya, penelitian gabungan yang dilakukan oleh Mayasari, Nani Darmayanti, Sugeng Riyanto (2013) berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan “Saweran untuk Gedung KPK” di Harian Umum Media Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu; (1) aspek kebahasaan yang digunakan dalam merepresentasikan tokoh dan topik pemberitaan, (2) hubungan antara ideologi *Harian Umum Media Indonesia* dan aspek kebahasaan yang dihasilkan, dan (3) situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aspek kebahasaan, ideologi pemberitaan, pemaknaan sosial budaya media, menempatkan tokoh atau institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam representasi yang positif dan menempatkan tokoh atau institusi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam representasi yang negatif.

Konstruksi realitas (pemberitaan) perseteruan KPK dan Polri yang dilakukan oleh *Harian Kompas* menarik untuk diteliti dan dikaji secara kritis. Hal ini mengasumsikan media melakukan manipulasi atau pemolesan fakta. Menurut Ibrahim (2011:85) media massa dianggap turut memberi andil dalam memoles kenyataan sosial. Hal ini tidak lepas dari pemahaman media tentang situasi-situasi yang terjadi yang kemudian dikemas dalam berita untuk disebarakan ke khalayak pembaca.

Teks berita pada dasarnya adalah upaya merekonstruksi sebuah kejadian, peristiwa atau realitas untuk disajikan kepada khalayak. Proses melakukan konstruksi ke dalam bentuk teks itu tidak terjadi dalam ruang yang hampa melainkan sarat dengan berbagai kepentingan. Baik dari sisi kepentingan internal organisasi media, maupun kepentingan institusi di luar media. Sehingga, teks berita pada akhirnya merupakan hasil kompromi dari seluruh bagian dari organisasi media untuk disajikan kepada pembaca. Proses mengkonstruksi realitas (dalam wujud berita) yang sebenarnya untuk disampaikan kepada khalayak pembaca melalui proses yang sangat rumit dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari personal wartawan, institusi media tempat wartawan bekerja hingga kondisi eksternal institusi media ikut memberikan peran bagaimana sebuah realitas disampaikan melalui wacana berita. Hal ini sesuai dengan penegasan Fairclough (2003:25) bahwa, wacana sebagai bentuk praktik sosial

Penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan dengan beberapa alasan. *Pertama*, wacana berita perseteruan KPK dan Polri merupakan hal yang sudah beberapa kali terjadi di Indonesia yang mengakibatkan adanya ketimpangan sistem pemerintahan Indonesia yang memungkinkan timbulnya keresahan bagi masyarakat. *Kedua*, wacana berita perseteruan KPK dan Polri masih menampakkan pertarungan wacana pada publik dan mengajukan versi atau opini masing-masing. *Ketiga*, perseteruan KPK dan Polri menampilkan berbagai situasi yang perlu dikaji dan diteliti. *Keempat*, berita perseteruan KPK dan Polri perlu dikaji secara kritis, agar situasi yang sebenarnya dapat terkonstruksi dan masyarakat tidak salah menilai siapa yang benar dan salah. *Kelima*, adanya keberpihakan media (dengan penamoiian situasi tertentu) pada institusi KPK atau Polri dalam pemerosesan berita. *Keenam*, berita perseteruan KPK dan Polri merupakan fenomena sosial dan linguistik yang tidak melupakan ketergantungannya pada latar belakang sosialbudaya, dimana situasional sangat diperhatikan.

Untuk memahami situasi-situasi yang diungkapkan oleh *Harian Kompas* dalam pemberitaan perseteruan KPK dan Polri digunakan pendekatan AWK yang kemudian dijelaskan secara kualitatif agar mendapat pemahaman yang komprehensif tentang realitas perseteruan. Analisis wacana kritis memprioritaskan cakupan penelitian pada dimensi bahasa dan kekuasaan sebagai presentasi makna wacana tertentu (Darma, 2013:49). Apa yang hendak diperoleh adalah mengungkap penyembunyian makna dalam wacana yang bertujuan menutupi kehendak sebenarnya dari seorang penutur, karena wacana bukanlah kehadiran yang sudah matang dan total. Akan tetapi mencitrakan gelagat psikologis penuturnya dan merupakan wujud kehadiran yang lain dalam beragam tanda-petanda berdasarkan situasi yang terjadi. Situasi dijadikan sebagai tolak ukur untuk melogiskan informasi kepada khalayak. Wacana menjadi gambaran (pemahaman situasional) tentang kehadiran dan sebaliknya menutupi kehadiran. Hal ini juga ditegaskan oleh Darma pada buku yang berbeda, bahwa melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing (Darma, 2014:101). Kuatnya sebuah pemberitaan dilakukan dengan penggambaran situasi-situasi yang sedang terjadi.

Penelitian ini mengkaji wacana berita perseteruan KPK dan Polri secara makro untuk mengungkap situasi-situasi yang digambarkan oleh *Harian Kompas* dalam pemberitaannya. Kajian difokuskan pada aspek wacana yang lebih besar, tidak terbatas pada aspek kebahasaan saja, tetapi melihat apa yang terjadi di luar bahasa tersebut, seperti situasi dan konteks yang melatarbelakangi pemberitaan. Hal ini sesuai dengan pandangan Fairclough, bahwa linguistik (wacana) sebagai fenomena sosial, dalam artian; aktivitas bahasa yang terjadi dalam konteks sosial (sebagaimana seluruh aktivitas berbahasa dilakukan) tidak hanya merupakan sebuah refleksi ataupun ekspresi dari proses dan praktik sosial, namun bagian dari proses dan praktik itu sendiri (Fairclough, 2003:26). Dengan kata lain, penelitian ini hanya mengkaji sisi lain dari teks berita yaitu apa yang menjadi konteks terwujudnya yaitu situasional berita yang digambarkan.

MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Sumber data yang digunakan yaitu surat kabar *Harian Kompas* yang terbit pada tahun 2015 yang berkategori *Hard News*. Data dalam penelitian ini berupa kata, frase, kalimat dan paragraf yang dikutip dari berita. Instrumen yang digunakan dalam pemilihan data yaitu menggunakan teknik dokumentasi di mana teks dibaca, diamati, dipahami, dan dipilih. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Haberman. Pemilihan ini digunakan untuk mendapat gambaran yang maksimal tentang situasi-situasi perseteruan yang terjadi antara KPK dan Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas, unik, sehingga suatu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain (Eriyanto, 2003:322). Kondisi dan situasi

menentukan kekhasan suatu berita. Dalam produksi sebuah berita, aspek situasional sangat diperhatikan oleh media. Setiap peristiwa selalu dibalut dengan konteks situasional yang khas. Dalam praktiknya, teks berita menampilkan suatu kondisi yang berbeda bergantung pada konteks situasi yang melatarinya. Kita sering kali berhadapan dengan situasi-situasi di mana seseorang berusaha meyakinkan kita akan satu titik pandang dengan menyajikan kepada kita alasan-alasan untuk menerimanya (Fisher, 2008:15). Melalui media, seseorang dapat menyampaikan kebenaran subjektifnya dengan alasan dan argumen tertentu dengan harapan alasan dan argumennya bisa diterima sebagai kebenaran. Hasil analisis data penelitian menemukan bahwa, situasi perseteruan antara KPK dan Polri menampilkan situasi: (a) saling melaporkan, (b) saling konfrontasi, (c) saling menyalahkan, (d) saling mencurigai, (e) saling menentang, dan (f) saling meyakinkan khalayak.

1. Situasi Saling Melaporkan

Melaporkan merupakan tindakan memberitahukan kepada seseorang tentang suatu hal. Sedangkan saling melaporkan mengindikasikan adanya pencarian kelemahan untuk diberitahukan kepada pihak yang berwajib. Dalam berita perseteruan KPK dan Polri, situasi saling melaporkan dinyatakan dengan penyebabakibat. Sebab-akibat adalah pernyataan yang menciptakan sebab-akibat atas dua pernyataan, di mana pernyataan pertama merupakan sebab dan pernyataan kedua merupakan akibat.

Harian Kompas memberitakan tindakan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut direspon negatif oleh kuasa hukum Budi yaitu Makdir Ismail dengan mengajukan dan melaporkan pimpinan KPK ke Kejagung dan Bareskrim Polri untuk diinterogasi. Pada situasi ini bahasa digunakan untuk melogiskan dua pernyataan yang saling berhubungan.

Selain dinyatakan dengan hubungan sebab akibat, situasi saling melaporkan juga dinyatakan dengan pemertentangan untuk mengambar situasi saling melaporkan. Pemertentangan adalah hubungan atas dua pernyataan yang memiliki hubungan pertentangan.

Dalam berita, tudingan Hasto Kristiyanton secara tegas ditentang dengan pernyataan *“tak boleh mengganggu penyidikan KPK penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Namun, pernyataan Hasto juga layak dijadikan momentum oleh KPK untuk berbenah”* merepresentasikan situasi saling melaporkan. Di mana Hasto Kristiyanto sebagai orang yang melaporkan dan Abraham Samad sebagai orang yang dilaporkan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, *Kompas* masih condong berpihak pada KPK. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pemilihan bahasa yakni *tak boleh mengganggu* dan *layak dijadikan momentum...berbenah*. Secara kritis, pernyataan yang digunakan menunjukkan pandangan positif kepada KPK. Bahasa sebagai instrument digunakan untuk mempertegas kejelasan informasi kepada khalayak pembaca.

Situasi saling melaporkan juga dinyatakan dengan peluhuran informasi pada nilai hukum. Di mana nilai hukum digunakan untuk memformalkan informasi yaitu membuat informasi yang semula tidak atau kurang meyakinkan menjadi meyakinkan.

Dalam berita, Budi melalui kuasa hukumnya (Eggi Sudjiman) melaporkan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung karena diduga menyalahgunakan kekuasaan dengan dalih KUHP *Pasal 421 KUHP jo Pasal 23 UU No 31/1999 tentang pemberantasan korupsi*. Kalimat *diduga telah menyalahgunakan kekuasaan* merepresentasikan KPK sebagai institusi yang tidak memperhatikan pasal 241 KUHP tentang pemberantasan korupsi yang berbunyi “*Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan*”. Hal tersebut juga menggambarkan Budi melakukan pembelaan atas dirinya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui kuasa hukumnya. Fungsi bahasa untuk peluhuran informasi pada nilai hukum bertujuan untuk melogiskan informasi yang kurang logis.

Situasi saling melaporkan juga dinyatakan dengan membuat klaim faktual. Klaim faktual adalah pernyataan yang dinyatakan dengan menyertakan fakta lapangan.

Dalam berita, Polisi melakukan penangkapan kepada Bambang Widjojanto dengan alasan pengarahannya keterangan palsu dalam sengketa pemilu kepala daerah Kota Waringin tahun 2010. Hal tersebut menggambarkan situasi saling melaporkan dengan menunjukkan bukti faktual yang ada. Penangkapan dilakukan oleh Polisi setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Kalimat *Bambang ditangkap polisi pada Jumat (23/1) sekitar pukul 07.30* merupakan kalimat pasif yang menunjukkan polisi menjadi pelaku. Bila diperhatikan dalam kasus ini, *Kompas* menggunakan klaim faktual untuk memberikan keterangan waktu dan tempat penangkapan Bambang. Selain itu juga, kalimat *Saat itu, Bambang baru mengantarkan anaknya sekolah. Malam harinya Bambang dinyatakan ditahan...* menjelaskan dramatisasi penangkapan Bambang secara akal sehat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di mana setiap penangkapan terlebih dahulu ada penyidikan dan penyelidikan. Dari penjelasan tersebut, menggambarkan situasi saling menangkap dan melaporkan. Keterangan waktu *Jumat (21/1), pukul 07.30*, dan *malam harinya* menunjukkan waktu yang sangat dekat, sehingga secara publik sulit berterima dan juga menyalahi hukum. Pernyataan *Saat itu, Bambang mengantarkan anaknya sekolah* memberikan citra negatif pada tindakan polisi. Hal tersebut melanggar moral hukum. Di mana penangkapan dilakukan di depan anak dan diborgol layaknya kriminalitas.

Secara kritis, dalam menggambarkan situasi yang saling melaporkan antara KPK dan Polri, *Harian Kompas* menggunakan bahasa-bahasa yang bertujuan untuk melogiskan informasi. Bahasa berita dikemas dengan cara sebab akibat di mana tujuannya adalah untuk menyatakan dua hal yang saling berhubungan. Pemertentangan bertujuan untuk mempertegas kejelasan informasi. Peluhuran informasi bertujuan untuk melogiskan informasi yang kurang logis menjadi logis. Klaim faktual bertujuan untuk menunjukkan kronologi situasi atau kejadian. Bahasa berita betul-betul dikemas dengan baik agar bisa dipahami oleh khlayak pembaca. Oleh karena itu, wacana merupakan praktik sosial di mana wacana dibuat berdasarkan ideologi dan tujuan tertentu (Fairclough, 2000).

2. Situasi Saling Konfrontasi

Konfrontasi adalah (a) suatu permusuhan atau pertentangan, (b) suatu kondisi yang bertentangan. Berdasarkan pengertian istilah *konfrontasi* di atas, situasi saling konfrontasi berarti situasi di mana tindakan dua belah pihak saling bermusuhan atau saling menentang.

Hasil analisis data menemukan, situasi saling konfrontasi digambarkan dengan pernyataan yang berisi pemertegasan informasi, penyebabakibatan, pengasumsian dan prasangka negatif. Pernyataan yang digunakan *Harian Kompas* dalam berita untuk menggambarkan situasi saling konfrontasi banyak menggunakan kutipan wawancara atau pernyataan partisipan publik. Sehingga informasi yang disampaikan bukan subjektivitas media tetapi pandangan publik. Pernyataan-pernyataan yang digunakan *Kompas* berindikasi pada citra positif bagi KPK dan citra negatif bagi Polri. KPK direpresentasikan sebagai institusi yang memperhatikan, diteror, diancam, dan diintimidasi. Polri direpresentasikan sebagai institusi yang mengintimidasi, meneror, mengancam dan menggunakan superioritas. Sehingga citra bagi Polri adalah citra negatif. Pernyataan partisipan publik berisi pembelaan-pembelaan bagi KPK dan menolak tindakan Polri.

Dalam berita, pernyataan empati disampaikan oleh Gus Sholah yang berstatus sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahudin Wahid. Pernyataan petama *amat prihatin dengan munculnya fenomena saling menyerang* menunjukkan keprihatinan atas kondisi perseteruan yang terjadi antara DPR, Polri, KPK, dan sejumlah partai politik yang saling konfrontasi atau menyerang. Pernyataan kedua *kondisi ini menunjukkan terjadinya ini menunjukkan terjadinya situasi tidak saling percaya antar situasi tidak saling percaya antara lembaga negara* merepresentasikan kondisi yang saling tidak percaya sebagai sebab terjadinya situasi saling konfrontasi. Pada data tersebut juga disebutkan bahwa situasi itu terjadi *dipicu oleh kasus budi*. Pernyataan Gus Sholah *“Jika di antara lembaga negara saja sudah tidak saling percaya, bagaimana mereka bisa membuat masyarakat luas bisa mempercayai mereka?”* merepresentasikan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi hukum, legislatif negara dan partai politik. Pernyataan itu juga menggambarkan kepentingan rakyat terletak di bawah kepentingan pribadi atau politik.

Pemilihan partisipan publik ini merepresentasikan suara rakyat atas situasi yang sedang terjadi antara KPK dan Polri. Tokoh agama dipandang bijak dan dapat diterima saat lembaga hukum saling bertentangan. Pemilihan ini tidak serta merta terjadi begitu saja tentu memiliki tujuan dalam penggunaannya di mana untuk mewakili suara orang banyak siapa yang harus disalahkan dan dibela.

Harian Kompas menggambarkan situasi saling konfrontasi dengan menggunakan bahasa partisipan publik. Pemilihan ini dilakukan oleh *Harian Kompas* bertujuan untuk menyeleamatkan subyektifitas media. Pemilihan ini dianggap sebagai pilihan yang terbaik untuk menjembatani suara publik yang mana sebagai sasaran konsumerisme media. Oleh karena itu, bahasa digunakan sebagai instrumen untuk mengkonkretkan pendapat publik figur tentang suatu peristiwa. Pemilihan tokoh agama digunakan sebagai suatu yang pas dan bijak bagi media untuk menimbang siapa yang dibela dan diingkari tindakannya dalam suatu

peristiwa. Oleh karena itu, wacana tidak bisa dilepaskan dari masyarakat, wacana bagian dari masyarakat, dan wacana berproses berdasarkan kondisi masyarakat (Fauzan, 2018).

3. Situasi Saling Menyalahkan

Menyalahkan adalah tindakan yang menganggap atau memandang salah. Sedangkan saling menyalahkan adalah perbuatan di mana seseorang saling menyalahkan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Hasil analisis data menemukan situasi saling menyalahkan dilandasi alasan nilai hukum.

Dalam berita, hak prerogratif presiden disalahkan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 11 ayat 5. Pernyataan yang menyalahkan pada data tersebut yakni *Presiden tidak menggunakan Pasal 11 Ayat 5 UU No 2/2000*. Pernyataan tersebut merepresentasikan Jokowi sebagai orang yang tidak teliti dan jeli dalam memilih calon Kapolri. Keterlibatan Andi pada situasi tersebut sebagai orang yang memberikan pendapat atas tindakan Jokowi yang mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri yang sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Hubungan Andi dengan *Kompas* sebagai orang yang diwawancarai untuk memberikan pendapat atas keputusan Jokowi yang bertentangan dengan hukum. Dalam situasi ini, bahasa digunakan untuk menyampaikan pendapat yang dilandasi nilai hukum.

Dalam situasi saling menyalahkan, penafsiran hukum sering juga dilakukan yang bertujuan untuk menyalahkan jika bersangkutan dengan nilai hukum. Penafsiran hukum adalah pemaknaan hukum dengan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Seperti tampak dalam berita, Peradi Luhut MP menilai tindakan Polri yang menangkap BW tidak sesuai dengan hukum acara. Di mana dalam hukum acara ada pemberitahuan atau pemanggilan terlebih dahulu. Apabila pihak yang dihubungi tidak merespon atau kooperatif baru dilakukan tindakan penangkapan. Pernyataan *...memprotes cara penangkapan Bambang Widjojanto karena tidak sesuai dengan hukum acara dan kepatutan* mengandung arti menyalahkan bahwa Polri telah melanggar hukum acara dan kepatutan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut merepresentasikan Polri mengedepankan kepentingan sendiri dari pada aturan hukum. Kepentingan diletakkan di atas aturan hukum yang berlaku. Situasi ini memberikan citra negatif bagi pihak Polri.

Keterlibatan Peradi pada situasi tersebut sebagai orang yang menyalahkan Polri dan menilai tindakan Polri tidak sesuai dengan hukum acara dan kepatutan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hubungan Peradi dengan *Kompas* sebagai orang yang dimintai penilaian atas tindakan Polri yang menangkap Bambang Widjojanto. Pada situasi ini, bahasa digunakan untuk memprotes sesuatu yang bertujuan untuk menyalahkan.

Situasi saling menyalahkan seseorang membuat pelabelan kepada pihak yang disalahkan. Di mana pelabelan tersebut bertujuan untuk memberikan identitas atau keterangan yang salah. Menurut Roekhan (2009:141) pelabelan adalah pemberian keterangan tentang

identitas, merek, atau petunjuk tentang orang atau pihak yang dilabeli agar dikenal oleh khalayak.

Dalam berita, permohonan yang diajukan Budi melalui kuasa hukumnya dilabeli *prematur*. Label tersebut bersifat negatif. Dengan label *prematur*, berasosiasi pada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Bertentangan dengan kodrat alamiah. Pernyataan *Permohonan praperadilan yang diajukan Budi dinilai juga prematur* merepresentasikan Budi sebagai orang memaksa kehendak untuk pembelaan dirinya dengan mengajukan permohonan Praperadilan ke Kejaksaan Agung Negeri Jakarta Selatan. Komitmen KPK untuk membuktikan bahwa tindakan Budi adalah prematur dengan *menghadirkan ahli, saksi, surat persidangan dan pembacaan dalil-dalil* hukum. Dari penjelasan tersebut, KPK menyalahkan tindakan Budi dengan menafsirkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi adalah prematur. Pada situasi ini, bahasa digunakan untuk melabeli seseorang dengan tujuan menyalahkan

Selain itu, catatan atau pengetahuan sering digunakan untuk menyalahkan tindakan tertentu. Di mana catatan atau pengetahuan ini sebagai dasar untuk menilai bahwa hal tertentu adalah salah. Catatan adalah seperangkat tulisan yang pernah dimuat atau didokumentasikan

Dalam berita, *Harian Kompas* menggunakan catatan yang dimiliki dan ditampilkan dalam berita. *Kompas* menilai *belum pernah* membuat catatan atau berita tentang pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pernyataan, *...pengadilan belum pernah mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi di KPK*” mengandung arti bahwa Kejaksaan menegaskan, pengadilan tidak pernah menerima dan mengabulkan pengajuan praperadilan. Catatan *Kompas* tersebut merepresentasikan pengetahuan *Kompas* tentang Kejaksaan yang tidak pernah mengabulkan praperadilan yang berstatus tersangka korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK. *Harian Kompas* menunjukkan subjektifitasnya ke dalam berita sebagai seperangkat pengetahuan. Secara tidak langsung *Kompas* menyalahkan tindakan Budi Gunawan yang mengajukan praperadilan ke Kejaksaan. Dalam situasi ini bahasa digunakan untuk mencatat peristiwa yang pada suatu waktu dan bisa digunakan serta dimanfaatkan dalam pemberitaan sejenis. Seperti yang ditegaskan oleh Kristeva, bahwa produksi berita tidak pernah murni, tetapi memiliki hubungan dengan teks sebelumnya atau yang disebut intertekstualitas (dalam Hoed, 2011:69).

Dalam situasi saling menyalahkan, penilaian atas sesuatu atau tindakan yang bertentangan didasari pada moralitas dan etika keputusan. Moralitas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun.

Dalam berita, Polri dinilai *tak senonoh* dan telah melanggar moralitas atau etika keputusan. Saldi Irsa sebagai kuasa Bambang meminta agar Presiden memerintahkan Polri untuk menerbitkan surat penyidikan, penyelidikan dan penangkapan (SP3) untuk Bambang yang diduga menggunakan kesaksian palsu pada kasus pemilu Kota Waringin tahun 2010. Pernyataan yang berisi menyalahkan adalah *Polri untuk menghentikan cara tak senonoh ini* mengandung arti Polri telah melanggar hukum acara. Polri direpresentasikan sebagai orang

yang tidak senonoh atau *semau gue* saat menangkap Bambang Widjojanto. Keterlibatan Saldi dalam berita dimunculkan *Kompas* sebagai orang yang menilai bahwa Polri telah melakukan perbuatan tak senonoh. Secara semantis, *tak senonoh* berarti perbuatan yang tidak sopan. Hubungan Saldi dengan *Kompas* sebagai partisipan yang memberikan penilaian atau komentar atas tindakan Polri dalam situasi penangkapan. Pada situasi ini, bahasa digunakan untuk mengekspresikan pendapat bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan moralitas dan etika kepatutan hukum. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak lepas dengan relasi dan ideologi yang melatarinya (Fairclough, 1993).

Alasan pelanggaran HAM juga sering kali digunakan untuk menyalahkan seseorang. Di mana perbuatan atau tindakan seseorang itu bersentuhan dengan HAM. Dalam berita perseteruan KPK dan Polri, pelanggaran HAM digunakan sebagai alasan untuk menyalahkan.

Dalam berita, Komnasham menilai Polri telah melakukan pelanggaran HAM. Sandra Moniaga menilai tindakan Polri sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pernyataan *...semestinya Polri melakukan pemanggilan terlebih dahulu. Jika dipanggil tiga kali dan yang bersangkutan tak kooperatif, penegak hukum berhak menangkap* merupakan alasan Sandra menilai tindakan Polri yang menangkap Bambang Widjojanto saat mengantar anaknya ke sekolah. Dari pernyataan tersebut, tergambar Polri tidak melakukan pemanggilan terlebih dahulu. Pernyataan Sandra ini juga merepresentasikan Polri sebagai institusi yang melanggar moralitas hukum. Keterlibatan Sandra pada situasi ini sebagai orang yang menilai tindakan Polri dari sudut pandang HAM. Indikasi dari penilaian ini adalah Polri dipandang sebagai institusi yang melanggar hak asasi seseorang. Hubungan Sandra dengan *Kompas* sebagai partisipan yang memberikan komentar atau penilaian atas tindakan Polri.

Secara semantis kata *semestinya* berarti diperkirakan atau diperidiksikan Polri melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan. Sedangkan rasa *bersangkutan tak kooperatif* berarti seseorang yang tidak menunjukkan kerja sama. Pada situasi ini, bahasa digunakan untuk menilai tindakan Polri secara HAM adalah bentuk pelanggaran.

Dalam situasi saling menyalahkan antara KPK dan Polri, bahasa digunakan untuk menyampaikan pendapat, memprotes atau mengkritik tindakan, melabeli tindakan positif-negatif, catatan pengalaman, mengekspresikan pendapat dan menilai tindakan. Semua itu dilakukan agar khalayak benar-benar paham tentang situasi perseteruan antara KPK dan Polri yang saling menyalahkan. Ini menunjukkan bahwa bahasa merupakan mekanisme kontrol yang sangat kuat (Haryatmoko, 2015).

4. Situasi Saling Mencurigai

Mencurigai adalah perbuatan yang menaruh perasaan syak atau sangsi terhadap suatu kebenaran dan kejujuran seseorang. Kecurigaan timbul bisa disebabkan karena ketidakpercayaan atas kebenaran, miskomunikasi dalam hubungan, kesalahpahaman, dan ketidakterbukaan dalam suatu masalah.

Situasi saling mencurigai yang ditemukan dalam penelitian ini digambarkan dengan pengungkapan fakta, prasangka negatif, penjelasan situasi, penafsiran waktu, pandangan politisasi, penyimpulan, penyebabakibatan, dan penafsiran konteks.

Dalam setiap berita selalu mengungkapkan fakta sebagai acuan penulisan berita. Suguhan fakta memberikan kebenaran atas apa yang diberitakan dan dipandang sebagai temuan, di mana fakta tersebut dikonstruksi berdasarkan ideologi yang akan disalurkan oleh media kepada khalayak.

Keterlibatan Bambang dan Budi dalam berita diungkapkan dalam bentuk hubungan saling mencurigai. Di mana, Bambang sebagai orang yang mencurigai kepemilikan Budi dan Budi sebagai orang yang dicurigai dan diselidiki. Kecurigaan yang dilakukan oleh KPK kepada Budi bertujuan untuk membuktikan apakah Budi bersalah-tidak bersalah atau benar-tidak benar. Pada situasi ini bahasa digunakan untuk mengungkapkan fakta di mana fakta tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencurigai seseorang. Bahasa mampu mendefinisikan dan menghasilkan objek pengetahuan tentang apa yang terjadi (Haryatmoko, 2015)

Selain itu, situasi saling mencurigai direpresentasikan dengan prasangka negatif. Prasangka negatif adalah wujud dari rasa kecurigaan. Di mana prasangka negatif ini secara psikologis muncul ketika ada suatu yang tidak selaras dan tidak berterima dan dianggap mengandung kepentingan atau ideologis.

Dalam berita, Hubungan yang tergambar antara KPK dan politisi Hasto adalah hubungan jarak sosial yang saling mencurigai dan membantah. Di mana kecurigaan dibantah dengan argumentasi pengingkaran. Pada situasi ini, bahasa digunakan untuk mengingkari setiap tuduhan yang diarahkan oleh seseorang untuk memastikan apakah tuduhan itu benar atau tidaknya.

Penjelasan situasi kejadian juga digunakan untuk menggambarkan situasi yang saling mencurigai. Situasi kejadian adalah keadaan khas yang terjadi pada suatu waktu. Penjelasan situasi digunakan untuk mendefinisikan sebuah peristiwa. Di mana dengan menjelaskan situasi tersebut, fakta lapangan bisa ditemukan atau kebenaran bisa diterima dengan membuat bentuk definisi.

Dalam berita, *Kompas* menjelaskan situasi dengan membuat definisi atas peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto. Di mana peristiwa penahanan tersebut dicurigai bagian dari cara Polri melemahkan KPK secara sistematis. Pernyataan *...diduga merupakan bagian dari upaya pelemahan KPK secara sistematis* adalah bentuk definisi yang menjelaskan situasi penahanan BW. Pernyataan tersebut merepresentasikan Polri melakukan aktivitas yang bertujuan untuk melemahkan KPK. Pada data tersebut juga berisi komitmen KPK untuk menjalankan tugasnya meski KPK merasa terancam dengan penahan BW oleh Polri. Ungkapan *meski demikian* merepresentasikan rasa prihatin dan *tetap tegar dan mengusut* merepresentasikan komitmen kuat KPK dalam memberantas korupsi di NKRI. Hubungan yang dimiliki *Kompas* dengan KPK dan Polri adalah sebagai pengamat yang menjelaskan situasi yang terjadi. *Kompas* menunjukkan subjektivitasnya dalam menggeneralisasi situasi dengan cara membuat definisi atas peristiwa yang tengah terjadi. Pada situasi ini, bahasa

digunakan untuk menjelaskan situasi kejadian. Dari penjelasan itu lahirlah sebuah definisi yang menggambarkan situasi yang sesungguhnya sehingga khlayak dengan mudah mengonstruksi pemahamannya tentang situasi yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak lahir secara netral melainkan membawa pesan ideologi tertentu (Fauzan, 2014).

Selanjutnya, strategi pemberitaan untuk menggambarkan situasi saling mencurigai dengan cara menafsirkan waktu. Waktu merupakan suatu dimensi di mana peristiwa terjadi secara berurutan. Penafsiran waktu digunakan dalam berita untuk menjelaskan terjadinya peristiwa. Waktu sebagai pertimbangan untuk melihat kronologis kejadian sebuah peristiwa.

Dalam berita, Din Samsudin mengamati dengan kesimpulan bahwa langkah Polri tidak berdiri sendiri. Ada tiga pernyataan Din yaitu: Pertama, *Ada nuansa dendam kepada KPK...* merepresentasikan langkah Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka didasari rasa dendam dan tidak berdiri sendiri. Kedua, *...jika dilihat dari timing-nya, juga sulit untuk dilihat sebagai suatu yang murni adanya* mengandung arti sesuatu yang dipaksakan dan bersifat sistematis atau direncanakan. Kedua pernyataan tersebut berisi kecurigaan pelogisan waktu bahwa langkah Polri memang terkait dengan langkah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka. Keterlibatan Din dalam berita diminta memberikan pendapat atas situasi perseteruan antara KPK dan Polri, karena Din diyakini bijak memberikan pendapat. Sudut pandang Din melihat situasi berdasarkan waktu tersebut menyimpulkan ada nuansa balas dendam dilakukan oleh Polri kepada KPK. Hubungan yang dimiliki Din dalam situasi ini adalah berperan sebagai pengamat dan pemberi pendapat. Di mana Din secara objektif memberikan penilaian berdasarkan kronologis peristiwa penetapan Bambang sebagai tersangka sehari setelah Budi Gunawan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Penilaian Din tersebut berdampak pada citra Polri tidak menggunakan hukum acara dalam menetapkan Bambang sebagai tersangka.

Penggunaan Din dalam situasi ini tidak serta merta murni terjadi. Penggunaan tokoh agama dalam situasi dipandang berterima sebagaimana tujuan utama pemberitaan adalah penerimaan secara masal. Dalam hal ini, berita dikemas dengan mengedepankan logika sosial sehingga pemilihan bahasa benar-benar sesuai dengan apa yang diminati atau didukung oleh khalayak banyak. Dengan kata lain bahwa penggunaan bahasa dibatasi oleh konvensi sosial (Hoed, 2011:69) Oleh karena itu, bahasa digunakan berdasarkan konteks sosial yang melatarinya-dimana bahasa digunakan.

5. Situasi Saling Menentang

Menentang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menolak atau melawan menggunakan pandangan tertentu. Tindakan menentang mengasumsikan adanya alasan tertentu untuk dipertahankan, dibela dan diperjuangkan. Tindakan ini boleh saja dilakukan oleh seseorang secara individual atau kelompok dan memiliki relasi dengan nilai-nilai hukum yang mengikat atau berhubungan dengan peristiwa yang terjadi.

Hasil analisis data menemukan bahwa situasi saling menentang dinyatakan dengan enam bentuk yakni: Pengharapan, alasan, penolakan, penafsiran hukum, gugatan dan pandangan hukum. Dalam berita, setiap pernyataan diawali dengan kalimat pengingkaran. Di

mana dalam kalimat pengingkaran tersebut kata yang digunakan untuk mengingkari sesuatu seperti *tidak*, *tak*, dan *bukan* kemudian diikuti oleh kalimat penjelasan sebagai bentuk alasan kenapa hal tersebut harus diingkari atau ditentang. Kata hubung yang biasa digunakan untuk menyatakan pertentangan adalah *karena*. Kata tersebut digunakan untuk menyatakan alasan kenapa kalimat pengingkaran itu diutarakan.

Kompas dalam menggambarkan situasi saling menentang banyak mengambil pendapat dari orang yang bersangkutan atau pihak yang terlibat. Dalam konstruksinya, *Kompas* melakukan wawancara dengan partisipan yang terkait perseteruan atau partisipan publik yang memberikan komentar atas situasi yang terjadi.

Hubungan yang dibentuk atau dibangun oleh *Kompas* adalah hubungan kemitraan. Di mana partisipan publik dijadikan mitra untuk memberikan komentar, pendapat, dan pandangan atas situasi yang terjadi. Dalam berita, *Kompas* mengidentifikasi diri sebagai orang yang berpihak pada KPK. Informasi-informasi yang digunakan baik dari partisipan publik maupun *Kompas* sendiri memberikan citra positif bagi KPK dan citra negatif bagi Polri.

Dalam situasi ini, bahasa digunakan untuk mengingkari pendapat atau hal tertentu. Di mana pengingkaran itu selalu diikuti dengan penjelasan atau berupa alasan. Penggunaan penjelasan atau alasan bertujuan untuk membentuk pengetahuan dan keyakinan bahwa apa yang disampaikan adalah bentuk kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki pluralitas makna dan secara potensial tak terhingga berdasarkan subjek pemakainya (Hoed, 2011:69)

6. Situasi Saling Meyakinkan Khalayak

Hasil analisis data menemukan bahwa situasi saling meyakinkan khalayak dilandasi bentuk alasan, penyimpulan, kalimat perintah, pandangan ahli, pemikiran, kepentingan umum, dan pandangan hukum. Penggunaan pernyataan yang berisi alasan digunakan untuk meyakinkan khalayak dengan alasan tertentu. Di mana alasan tersebut bersifat logis dan berterima. Penyimpulan digunakan untuk meyakinkan khalayak untuk menggeneralisasi situasi yang terjadi. Kalimat perintah digunakan untuk sesuatu yang bersifat umum. Di mana seseorang dimunculkan karena memiliki otoritas lebih tinggi.

Selain itu, pandangan ahli sangat berperan dan sering digunakan oleh *Kompas* untuk membentuk keyakinan bagi publik. Hal tersebut dikonstruksi berindikasi pada kredibilitas informasi. Dalam berita perseteruan KPK dan Polri, pernyataan yang berisi pemikiran sering digunakan. Seseorang dimunculkan bersama pemikirannya atau pendapatnya bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi khalayak. Landasan pemikiran ini berdampak pada pembentukan pengetahuan dan keyakinan atas kondisi situasi yang terjadi. Dalam situasi tertentu seseorang atau partisipan publik dalam berita menyampaikan pendapat secara netral demi kepentingan umum. Berlandaskan kepentingan umum tersebut, seseorang akan cepat mempengaruhi khalayak di mana kepentingan tersebut adalah milik semua pihak. Pada situasi yang bersentuhan hukum, seseorang akan menggunakan pandangan hukum. Hal itu digunakan untuk meyakinkan khalayak bahwa hal ini atau itu yang benar. Hukum dijadikan

dalil untuk memperkuat gagasannya atau fakta yang sudah menjadi konvensi (kesepakatan) bersama dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan jika hukum dianggap tidak benar berdasarkan peristiwa yang terjadi, penafsiran hukum dianggap berterima sebagai sebuah kesepakatan (konvensi) di kalangan ahli hukum. Penggunaan fakta seperti ini digunakan dalam peristiwa perseteruan KPK dan Polri yang mana tujuannya masih-masing adalah untuk meyakinkan khalayak.

Dalam berita perseteruan KPK dan Polri pada situasi saling meyakinkan khalayak banyak melibatkan partisipan publik. Di mana partisipan publik memberikan pendapat, pandangan, lisan, dan komentar atas situasi tertentu. Dalam hal ini, *Kompas* tidak banyak melibatkan diri dalam memberikan pandangan subjektivitasnya. Keterlibatan *Kompas* pada situasi saling meyakinkan khalayak dalam berita menggunakan cara pengidentifikasian diri. Di mana *Kompas* hanya mengungkapkan pendapat partisipan publik atas situasi yang terjadi yang menjadi topik pemberitaan.

Dalam situasi ini, *Kompas* sebagai media banyak menggunakan partisipan publik ke dalam berita dan menggambarkan partisipan publik terbagi dua yakni pihak yang membela KPK dan pihak yang membela Polri. Tetapi, secara umum partisipan publik yang membela KPK lebih beragam dibandingkan partisipan yang membela Polri. Pemunculan ini, merepresentasikan kedua lembaga yang bertentangan adalah sebagai objek pembicaraan. Di mana *Kompas* hanya sebagai orang yang menampilkan partisipan publik yang saling mengemukakan pendapat dan komentarnya terhadap situasi perseteruan yang terjadi.

Penggunaan partisipan publik seperti penggunaan tokoh agama, rektor, ahli hukum, dan budayawan bertujuan untuk meyakinkan khalayak bahwa apa yang dilakukan oleh pihak KPK atau Polri bisa dinilai positif atau negatif berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh partisipan publik tersebut. Ini sebagai fenomena alamiah yang dialami oleh manusia yaitu selalu mengacu pada pendapat-pendapat yang status sosial lebih tinggi. Hal itu dianggap wajar bahwa, orang yang menjadi tokoh agama dianggap mampu menilai secara objektif terhadap peristiwa yang terjadi.

Dalam situasi ini, bahasa digunakan untuk meyakinkan khalayak dengan memanfaatkan pendapat tokoh atau orang yang ditokohkan berdasarkan keahliannya masing-masing untuk mendapatkan penilaian yang objektif. Bahasa dikonstruksi dan dipilih melalui bahasa partisipan publik yang disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Hal ini terjadi karena berita mengandung dua aspek sekaligus yaitu praktik pemaknaan dan praktik produktivitas berdasarkan situasi yang terjadi (Hoed, 2011:68).

SIMPULAN

Setiap teks dihasilkan dalam suatu kondisi atau suasana yang khas, unik, sehingga suatu teks bisa jadi berbeda dengan teks yang lain. Hal tersebut yang tampak dalam berita tentang perseteruan KPK dan Polri yang diberitakan oleh Harian *Kompas* Kondisi dan situasi menentukan kekhasan suatu berita. Pemberitaannya selalu dihubungkan berdasarkan kronologi-kronologi. Melalui pemberitaan yang tersebut merepresentasikan situasional yang

sedang terjadi dan semua itu tidak lepas dari proses produksi suatu berita. Dalam produksi sebuah berita, aspek situasional sangat diperhatikan oleh media. Setiap peristiwa selalu dibalut dengan konteks situasional yang khas. Dalam praktiknya, teks berita menampilkan suatu kondisi yang berbeda bergantung pada konteks situasi yang melatarinya. Kita sering kali berhadapan dengan situasi-situasi di mana seseorang berusaha meyakinkan akan satu titik pandang dengan menyajikan kepada kita alasan-alasan untuk menerimanya. Hasil analisis data penelitian menemukan bahwa, situasi perseteruan antara KPK dan Polri menampilkan situasi yang beragam berdasarkan metode penyajian berita dan memanfaatkan bahasa sebagai instrumen untuk menggambarkan situasi-situasi perseteruan antara KPK dan Polri. Berdasarkan analisa secara kritis ditemukan KPK dan Polri dalam berita yaitu; (a) saling melaporkan, (b) saling konfrontasi, (c) saling menyalahkan, (d) saling mencurigai, (e) saling menentang, dan (f) saling meyakinkan khalayak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bland, Michael. 2001. *Hubungan Media Yang Efektif*. Terjemahan Syahrul, S.E. 2004. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana dalam Multiperspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2013. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Penerbit YRAMA WIDYA.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LkiS Yogjakart.
- Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: The universities. *Discourse & Society*, 4(2), 133–168. <https://doi.org/10.1177/0957926593004002002>
- Fairclough, N. (2000). Language and Neo-Liberalism. *Discourse & Society*, 11(2), 147–148. <https://doi.org/10.1177/0957926500011002001>
- Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis Dari Model Fairclough Hingga Mills. *European Journal of Endocrinology*, 171(6), 727–735. <https://doi.org/10.1530/EJE-14-0355>
- Fauzan, U. (2018). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough. *The First Educational Linguistics Conference*, 1(2), 524. <https://doi.org/10.5296/ijl.v6i4.6147>
- Fairclough, Norman. 1989. *Language And Power; Relasi Bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*. Terjemahan Indah Rohmani-Komunitas Ambarawa. 2003. Malang: Boyan Publishing.
- Haryatmoko, J. (2015). Kondisi Ideologis Dan Derajat Keteramalan Analisa Wacana Kritis Norman Fairclough. *Diskursus*, 14(2), 153–192.
- Fisher, Alec. 2007. *Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar*. Terjemahan Benyamin Hadinata. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hoed, H. Benny. 2011. *Semiotika dan Dinamina Sosial*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ibrahim, Ida Subandy. 2011. *Kritik Budaya Komunikasi: Budaya, Media, dan Gaya Hidup Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rahardi, Kunjana. 2012. *Menulis Artikel Opini dan Kolom Di Media Masa*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

